



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu meninjau kembali Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya ;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disebut PPK - PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA - PD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Denpasar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan kesejahteraanya.
- (2) Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

## BAB III

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA .  
KEPADA PEGAWAI

## Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi atau Organisasi/Unit Kerja lain di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

## Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dengan pertimbangan tingkat jabatan/eselon dan pangkat/golongan serta tugas-tugas tertentu.
  - b. Berdasarkan tugas tambahan yang meliputi :
    1. Selaku Pengguna Anggaran (PA) ;
    2. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
    3. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
    4. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
    5. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    6. Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
    7. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN

## Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan beban kerja dibayar setelah PNS dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (3) Bagi PNS/Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, maka tambahan penghasilan diberikan yang paling menguntungkan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berdampak terhadap Pelayanan kepada Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan, Pejabat terjadi kekosongan sehingga ditunjuk Pelaksana Tugas, maka tambahan penghasilannya diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) yang bersangkutan.

- (5) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam waktu bersamaan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada eselon yang lebih tinggi maka tambahan penghasilan diberikan yang paling menguntungkan.

## BAB V

### PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 6

Pemberian Tambahan penghasilan kepada Pegawai diberhentikan apabila :

- a. Menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara, termasuk ijin melahirkan anak ke-4 (empat) ;
- b. Menjalani bebas tugas untuk masa persiapan pensiun (MPP);
- c. Diberhentikan untuk sementara/non aktif; dan
- d. Menjalani hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar tanggal 5 September 2014 Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kreteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tunjangan Khusus Tenaga Harian Lepas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/653/HK/2017 tentang Pemberlakuan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/803/2013 tentang Biaya Pengawasan Bagi Aparat Pengawasan pada Inspektorat Kota Denpasar.

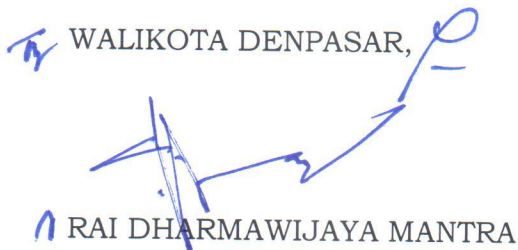
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2017

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Agustus 2017

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2017

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL


BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

No.	Uraian Eselon, Jabatan dan Golongan	TPP berdasarkan eselon/golongan dan tugas tertentu	TPP berdasarkan Tugas Tambahan	Besarnya TPP yang diterima
I.	Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah			
1	Eselon II a			
	Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran	31,000,000.00	1,000,000.00	32,000,000.00
2	Eselon II b			
	a. Asisten	27,000,000.00	-	27,000,000.00
	b. Eselon II b selaku Pengguna Anggaran	21,000,000.00	1,000,000.00	22,000,000.00
	c. Eselon II b Lainnya	21,000,000.00	-	21,000,000.00
3	Eselon III a			
	a. Camat selaku Pengguna Anggaran	15,500,000.00	1,000,000.00	16,500,000.00
	b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran	15,500,000.00	500,000.00	16,000,000.00
	c. Eselon III a selaku Kuasa Pengguna Anggaran	12,000,000.00	500,000.00	12,500,000.00
	d. Eselon III a selaku Pejabat Pembuat Komitmen	12,000,000.00	250,000.00	12,250,000.00
	e. Eselon III a Lainnya	12,000,000.00	-	12,000,000.00
4	Eselon III b			
	a. Eselon III b selaku Kuasa Pengguna Anggaran	8,500,000.00	500,000.00	9,000,000.00
	b. Eselon III b Selaku Pejabat Pembuat Komitmen	8,500,000.00	250,000.00	8,750,000.00
	c. Eselon III b selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	8,500,000.00	100,000.00	8,600,000.00
	d. Eselon III b Lainnya	8,500,000.00	-	8,500,000.00
5	Eselon IV a			
	a. Eselon IV a (Lurah)			
	1) Golongan IV	6,250,000.00	-	6,250,000.00
	2) Golongan III	5,500,000.00	-	5,500,000.00
	b. Eselon IV a Pada Sekretariat Daerah			
	1) Eselon IV a Selaku Pejabat Pembuat Komitmen			
	- Golongan IV	5,600,000.00	250,000.00	5,850,000.00
	- Golongan III	4,900,000.00	250,000.00	5,150,000.00
	2) Eselon IV a Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	- Golongan IV	5,600,000.00	200,000.00	5,800,000.00
	- Golongan III	4,900,000.00	200,000.00	5,100,000.00
	3) Eselon IV a Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	- Golongan IV	5,600,000.00	100,000.00	5,700,000.00
	- Golongan III	4,900,000.00	100,000.00	5,000,000.00
	4) Eselon IV a Lainnya			
	- Golongan IV	5,600,000.00	-	5,600,000.00
	- Golongan III	4,900,000.00	-	4,900,000.00
	c. Eselon IV a pada Perangkat Daerah Lainnya			
	1) Eselon IV a Selaku Pejabat Pembuat Komitmen			
	- Golongan IV	5,000,000.00	250,000.00	5,250,000.00
	- Golongan III	4,400,000.00	250,000.00	4,650,000.00
	2) Eselon IV a Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	- Golongan IV	5,000,000.00	200,000.00	5,200,000.00
	- Golongan III	4,400,000.00	200,000.00	4,600,000.00
	3) Eselon IV a Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	- Golongan IV	5,000,000.00	100,000.00	5,100,000.00
	- Golongan III	4,400,000.00	100,000.00	4,500,000.00
	4) Eselon IV a Lainnya			
	- Golongan IV	5,000,000.00	-	5,000,000.00
	- Golongan III	4,400,000.00	-	4,400,000.00
6	Eselon IV b			
	Eselon IV b Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan	3,750,000.00	200,000.00	3,950,000.00
	Eselon IV b Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	3,750,000.00	100,000.00	3,850,000.00
7	Eselon V a/b	3,250,000.00	-	3,250,000.00
8	Fungsional Umum/Staf			
	a. Golongan IV	2,750,000.00	-	2,750,000.00
	b. Golongan III	2,300,000.00	-	2,300,000.00
	c. Golongan II	1,850,000.00	-	1,850,000.00
	d. Golongan I	1,550,000.00	-	1,550,000.00
9	Kepala Sekolah TKN, SDN, SMPN	2,000,000.00	-	2,000,000.00

No.	Uraian Eselon, Jabatan dan Golongan	TPP berdasarkan eselon/golongan dan tugas tertentu	TPP berdasarkan Tugas Tambahan	Besarnya TPP yang diterima
10	Fungsional Guru			
	a. Golongan IV	500,000.00	-	500,000.00
	b. Golongan III	437,500.00	-	437,500.00
	c. Golongan II dan I	350,000.00	-	350,000.00
11	Fungsional Medis pada Dinas Kesehatan dan RSUD Wangaya			
	a. Golongan IV	2,550,000.00	-	2,550,000.00
	b. Golongan III	2,100,000.00	-	2,100,000.00
	c. Golongan II	1,750,000.00	-	1,750,000.00
	d. Golongan I	1,500,000.00	-	1,500,000.00
12	Fungsional Lainnya			
	a. Golongan IV	2,750,000.00	-	2,750,000.00
	b. Golongan III	2,300,000.00	-	2,300,000.00
	c. Golongan II	1,850,000.00	-	1,850,000.00
	d. Golongan I	1,700,000.00	-	1,700,000.00
II.	Tambahan Penghasilan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Eselon II b			
	Eselon II b selaku Pengguna Anggaran	23,000,000.00	1,000,000.00	24,000,000.00
	Eselon II b selaku Bendahara Umum Daerah	23,000,000.00	1,000,000.00	24,000,000.00
2	Eselon III a			
	a. Eselon III a selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	14,000,000.00	750,000.00	14,750,000.00
	b. Eselon III a selaku Kuasa Pengguna Anggaran	14,000,000.00	500,000.00	14,500,000.00
	c. Eselon III a selaku Pejabat Pembuat Komitmen	14,000,000.00	250,000.00	14,250,000.00
	d. Eselon III a Lainnya	14,000,000.00		14,000,000.00
3	Eselon III b			
	a. Eselon III b selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	11,000,000.00	750,000.00	11,750,000.00
	b. Eselon III b selaku Kuasa Pengguna Anggaran	11,000,000.00	500,000.00	11,500,000.00
	c. Eselon III b selaku Pejabat Pembuat Komitmen	11,000,000.00	250,000.00	11,250,000.00
	d. Eselon III b selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	11,000,000.00	100,000.00	11,100,000.00
	e. Eselon III b Lainnya	11,000,000.00		11,000,000.00
4	Eselon IV a			
	a. Eselon IV a selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah			
	- Golongan IV	7,800,000.00	500,000.00	8,300,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	500,000.00	7,400,000.00
	b. Eselon IV a selaku Pejabat Pembuat Komitmen			
	- Golongan IV	7,800,000.00	250,000.00	8,050,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	250,000.00	7,150,000.00
	c. Eselon IV a selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	- Golongan IV	7,800,000.00	200,000.00	8,000,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	200,000.00	7,100,000.00
	d. Eselon IV a selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	- Golongan IV	7,800,000.00	100,000.00	7,900,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	100,000.00	7,000,000.00
	e. Eselon IV a Lainnya			
	- Golongan IV	7,800,000.00	-	7,800,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	-	6,900,000.00
5	Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD			
	a. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD Ahli Madya	11,000,000.00	-	11,000,000.00
	b. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD Ahli Muda	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	c. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD Ahli Pertama	6,500,000.00	-	6,500,000.00
	d. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD Terampil	5,000,000.00	-	5,000,000.00
6	Staf			
	a. Golongan IV	4,000,000.00	-	4,000,000.00
	b. Golongan III	3,500,000.00	-	3,500,000.00
	c. Golongan II	2,750,000.00	-	2,750,000.00
	d. Golongan I	2,500,000.00	-	2,500,000.00
III.	Tambahan Penghasilan Pegawai Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi			
	a. Mediator/Perantara Golongan IV	4,000,000.00	-	4,000,000.00
	b. Pengawas/Pengantar Kerja Golongan IV	3,750,000.00	-	3,750,000.00
	c. Mediator/Perantara Golongan III	3,500,000.00	-	3,500,000.00
	d. Pengawas/Pengantar Kerja Golongan III	3,250,000.00	-	3,250,000.00

No.	Uraian Eselon, Jabatan dan Golongan	TPP berdasarkan eselon/golongan dan tugas tertentu	TPP berdasarkan Tugas Tambahan	Besarnya TPP yang diterima
IV.	Tambahan Penghasilan pada Bagian Humas dan Protokol			
1	Eselon III a Selaku Kuasa Pengguna Anggaran	16,000,000.00	500,000.00	16,500,000.00
2	Eselon III a Selaku Pejabat Pembuat Komitmen	16,000,000.00	250,000.00	16,250,000.00
3	Eselon III a Lainnya	16,000,000.00	-	16,000,000.00
4	Eselon IV a			
	a. Eselon IV a Selaku Pejabat Pembuat Komitmen			
	- Golongan IV	7,800,000.00	250,000.00	8,050,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	250,000.00	7,150,000.00
	b. Eselon IV a Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	- Golongan IV	7,800,000.00	100,000.00	7,900,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	100,000.00	7,000,000.00
	c. Eselon IV a Lainnya			
	- Golongan IV	7,800,000.00	-	7,800,000.00
	- Golongan III	6,900,000.00	-	6,900,000.00
5	Staf			
	a. Golongan IV	4,000,000.00	-	4,000,000.00
	b. Golongan III	3,450,000.00	-	3,450,000.00
	c. Golongan II	2,700,000.00	-	2,700,000.00
	d. Golongan I	2,400,000.00	-	2,400,000.00
V.	Tambahan Penghasilan Ajudan, Sopir dan Sekpri Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah Kota Denpasar			
	a. Ajudan Walikota dan Wakil Walikota			
	- Golongan III	3,500,000.00	-	3,500,000.00
	- Golongan II	2,800,000.00	-	2,800,000.00
	- Golongan I	2,500,000.00	-	2,500,000.00
	b. Sopir Walikota dan Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah			
	- Golongan III	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	- Golongan II	2,500,000.00	-	2,500,000.00
	- Golongan I	2,250,000.00	-	2,250,000.00
	c. Sekpri Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Asisten			
	- Golongan III	3,050,000.00	-	3,050,000.00
	- Golongan II	2,500,000.00	-	2,500,000.00
	- Golongan I	2,250,000.00	-	2,250,000.00

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA